



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JUNAIDI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 180965

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.330.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 113 m2/38 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/47 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
3. Tanah Seluas 108 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000		
4. Tanah Seluas 180 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	90.000.000
1. MOBIL, TOYOTA AVANZA VELOZ MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	53.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	31.706.942
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.504.706.942
III. HUTANG	Rp.	505.401.832
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	999.305.110

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.